

LAPORAN PENELITIAN

R. FH.
171-13-12-01
R 15278

**PERBANDINGAN ANTARA
ETIKA KEUTAMAAN DAN ETIKA KEWAJIBAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA**

NCI BookMan 2.30



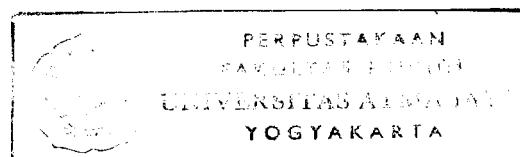
MILIK	PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA	YOGYAKARTA
DITERIMA	: 13 DEC 2001
INVENTARISASI	: 051/FH/Hd-12 Pen/01
Oleh :	REASIPKAS : R-f. 340 / Pen / p
SELESAI	: 20 APR 2002

Hyronimus Rhiti, SH. LL.M.

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**DIBIYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000/2001**



IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul : PERBANDINGAN ANTARA ETIKA KEUTAMAAN DAN ETIKA KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
b. Macam Penelitian : *Penelitian Kepustakaan*
c. Kategori Penelitian : *I.*
2. Kepala Proyek Penelitian
 - a. Nama : Hyronimus Rhiti, SH. LLM.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III b
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 - g. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
3. Jumlah anggota Pelaksana: 1 (satu) orang
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan
5. Biaya yang diperlukan : Rp 750.000

Yogyakarta, November 2001

Menyetujui,
Pembimbing



Drs. Paulinus Soge, SH. MS.

Pelaksana,



Hyronimus Rhiti, SH. LLM.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Ch. Eviutami Mediastika, ST. Ph.D.
Ch. Eviutami Mediastika, ST. Ph.D.

Menyetujui

Kepala LPU UAJY



Ch. Eviutami Mediastika, ST. Ph.D.

KETERANGAN PENILAIAN HASIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : *Drs. Paulinus Soge, S.H. M. Hum.*
Jabatan Akademik : *Lektor Kepala*
Pangkat/golongan : *Pembina Utama I IV-c.*
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul : PERBANDINGAN ANTARA ETIKA KEUTAMAAN DAN ETIKA KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA, dilakukan oleh :

Hyronimus Rhiti, SH. LLM., Dosen Fakultas Hukum UAJY

Setelah diadakan pembimbingan, saya nyatakan telah selesai dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. Aspek Materi dan Analisisnya : ~~sangat baik~~ / baik / ~~sedang~~ / ~~cukup~~
2. Aspek Metodologi Penelitian : ~~sangat baik~~ / baik / ~~sedang~~ / ~~cukup~~
3. Aspek Format Penulisan : ~~sangat baik~~ / baik / ~~sedang~~ / ~~cukup~~

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Desember 2001

Pembimbing Penelitian,



Drs. Paulinus Soge, SH. MS.

PRAKATA

Laporan penelitian ini merupakan sebuah pekerjaan yang sudah sangat lama tertunda penyelesaiannya. Judul penelitian : PERBANDINGAN ANTARA ETIKA KEUTAMAAN DAN ETIKA KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA, adalah penelitian komparasi di bidang filsafat moral (etika). Yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa etika lingkungan hidup dapat juga dijadikan pedoman berperilaku secara moral bagi manusia Indonesia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.

Penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan juga berkat bantuan beberapa pihak, antara lain Rektor UAJY dan Kepala LPU UAJY yang telah memperkenankan perpanjangan waktu penelitian. Untuk itu penulis mengucapkan berlimpah terima kasih. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Paulinus Soge, SH. MS. sebagai pembimbing yang telah turut membimbing penelitian ini.

Akhirnya, segala saran, kritik dan masukan baik bagi penulis maupun bagi hasil penelitian ini, sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, Desember 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KETERANGAN PENILAIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Perumusan Masalah
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Etika Dan Moral
	B. Etika Keutamaan Dan Etika Kewajiban
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	A. Tujuan Penelitian
	B. Manfaat Penelitian
BAB IV	METODE PENELITIAN
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Pengertian Etika
	1. Moral
	2. Moralitas
	B. Pembagian Etika
	C. Pengelolaan Lingkungan Hidup
	D. Perbandingan Etika
	1. Moral Lingkungan
	2. Sifat Etika Lingkungan Hidup
	a. Etika Deskriptif
	b. Etika Normatif
	c. Etika Keutamaan dan Etika Kewajiban
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Seperti diketahui, bahwa upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan *ansich* dapat dilakukan melalui berbagai sarana, antara lain melalui hukum, teknologi dan ekonomi. Sarana-sarana itu tidak berdiri sendiri, melainkan secara integral dan interdisipliner dapat bekerja sama untuk satu tujuan yaitu pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Alasan ekologisnya ialah karena semua berdiri di atas basis yang sama yaitu: **Lingkungan Hidup**. Tanpa lingkungan hidup – atau tanpa lingkungan hidup yang baik dan sehat - sulit dibayangkan adanya perkembangan yang sehat dari hukum, kemanfaatan teknologi dan keberdayaan ekonomi. Dengan kata lain, kualitas hidup (*lebens-qualität*) yang hendak dicapai oleh substansi masing-masing sarana itu tidak pernah akan terwujud, jika lingkungan hidup sendiri mengalami kehancuran (Kloepfer, 1989 : 4).

Meskipun ada kerja sama teknis dan ilmiah antara sarana-sarana di atas, belum dapat dikatakan bahwa dengan sendirinya semua masalah lingkungan akan dapat diatasi. Masalah lingkungan hidup bersifat multi dimensional dan terlalu rumit untuk dipecahkan hanya dengan sarana-sarana teknologi, hukum dan ekonomi itu saja. Masih dibutuhkan sarana-sarana lain seperti politik, agama, etika dan seterusnya. Dengan politik, arah kebijaksanaan dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pembuatan peraturan perundangannya ditentukan. Melalui ajaran agama manusia disadarkan akan

pentingnya lingkungan hidup sebagai anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga dan dengan etika, tingkah laku orang dikendalikan “dari dalam” agar senantiasa merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya.

Dalam tulisan ini akan disoroti khusus tentang *etika*. Dalam hal ini etika yang dimaksud adalah *etika lingkungan hidup* (selanjutnya disebut etika lingkungan). Ia adalah sebuah bidang yang sering luput dari perhatian, dan dianggap sebagai “ketinggalan jaman” dalam hal menetapkan norma. Secara politis, etika lingkungan dianggap sebagai suatu perangkat “lunak”. Karena itu orang lebih mengandalkan alat-alat yang “lebih keras” berupa insentif atau tekanan ekonomis, pedoman teknis yang diwajibkan atas perintah, dan arahan serta kekangan hukum *casu quo* undang-undang (Bernhard Glaeser, 1989: 136).

Padahal etika sebenarnya tidak dapat dihindari atau diabaikan begitu saja. Dengan etika orang dapat mengenal dan memahami nilai dan norma-norma yang membimbing perilaku *poiesis* individual dan sosial terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Artinya, dasar etika ini adalah tindakan yang ditujukan kepada alam dan lingkungan (E. Dussel, 1980: 101). Dan sebagai sebuah cabang filsafat, etika adalah landasan rasional bagi tuntutan akan perlindungan lingkungan. Aspek lingkungan ini bukan hanya sekedar menyangkut bidang ekologi, melainkan juga menyangkut etika. Sebagaimana ekologi, etika tidak bersifat final. Artinya, ia masih perlu dicari, dan mempunyai kemungkinan terbuka untuk perubahan dan kritik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah sifat Etika lingkungan hidup di Indonesia dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ?”



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Uraian teoretis dalam tulisan ini adalah usaha untuk mencari dan memahami etika lingkungan, bukan rumusan-rumusan yang telah jadi dan mapan. Karena itu, masih terbuka kemungkinan untuk koreksi dan penyempurnaan.

A. Etika dan Moral

Etika sering dikatakan sebagai pemikiran filosofis tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu tanggung jawab. Disebut sebagai pemikiran filosofis karena secara historis etika berkembang sejalan dengan perkembangan filsafat. Dalam filsafat Yunani, etika bersumber dari spekulasi tentang kehidupan yang baik yang disistematisasikan ke dalam bagian filsafat dan disebut sebagai *etika*. Kata itu menunjuk pada “kebiasaan-kebiasaan” (*customs*), yaitu kebiasaan dalam arti ide tentang yang baik dan yang buruk tentang manusia (Austin Fagothey, 1953: 18, 36). Dalam perkembangan selanjutnya, etika dianggap sebagai bagian dari filsafat atau yang biasa disebut sebagai : “filsafat etika”.

Pengertian etika kemudian berkembang dan sering dikacaukan dengan pengertian moral. Hal ini dapat dimengerti karena etika didefinisikan sebagai “ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral”. Padahal, kesusilaan atau moral itu sendiri adalah keseluruhan aturan, kaedah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan (H. De Vos, 1987: 1,3). Maka dari sini dapat juga dikatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang

keseluruhan aturan, kaedah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan.

Selain^{itu} sering juga dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang ajaran moral. Dengan demikian maka etika berbeda dengan moral (kesusilaan). Ajaran moral menjawab pertanyaan “bagaiman orang harus hidup, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan apa yang wajib diperbuat ?” Sedangkan etika menjawab pertanyaan “bagaimana pertanyaan moral tersebut dapat dijawab”. Maka etika disini tidak mengajarkan apa yang wajib dilakukan orang, melainkan bagaimana pertanyaan itu dapat dijawab secara rasional dan bertanggung jawab (Magnis-Suseno, 1991 : 10). Tetapi walaupun *per definisi* etika berbeda dengan ajaran moral, namun itu tidak berarti bahwa ajaran moral itu sendiri lebih rendah kedudukannya dari pada etika. Justeru etika berkembang karena substansinya adalah ajaran moral. Tanpa pertanyaan dari ajaran moral, tidak ada pertanyaan yang dapat dijawab oleh etika.

Ajaran moral mengatur perilaku manusia dan masyarakat. Ada kewajiban dan darna yang ditanamkan oleh moral (kesusilaan) itu yang harus dilakukan manusia. Ada pula unsur kebebasan dan ketidakbebasan dalam moral itu. Maksudnya, orang tidak boleh berbuat bebas semaunya sendiri, dan bebas semaunya untuk tidak berbuat apapun, melainkan berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan kebebasan yang ditetapkan aturan moral bagi perilakunya. Dalam bidang lingkungan hidup misalnya, orang harus berbuat sesuatu: merawat, melestarikan dan mengelolanya sesuai dengan tanggung jawab moralnya. Kebebasan tidak boleh dipergunakan untuk merusak lingkungan hidup, dan iapun tidak boleh bebas untuk tidak berbuat sesuatu

terhadap lingkungan hidupnya. Bahkan kalau orang menaati norma hukum lingkungan (norma lahiriah) itu bukan semata-mata karena hukum itu sendiri, atau karena akibatnya yang menguntungkan atau lantaran takut pada penguasa; melainkan karena orang menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban moral yang mesti dilakukan (bdk, dengan Immanuel Kant, seperti yang dikutip oleh Lili Tjahjadi, 1991:48). Kebebasan di sini tidak hanya dalam melakukan kewajiban, tetapi juga melakukan kewajiban untuk menaati hukum adalah perbuatan “yang membebaskan”.

B. Etika Keutamaan dan Etika Kewajiban

Dalam mencari dan memahami etika lingkungan hidup, perlu pula diperhatikan dua macam etika, yaitu *etika keutamaan dan etika kewajiban*. Manakah dari keduanya yang lebih baik dijadikan pola bagi etika lingkungan hidup? uraian di bawah berusaha untuk menjawabnya.

1. Etika Keutamaan

Etika keutamaan adalah teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak berurusan dengan *benar dan salahnya* tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan *baik-buruknya* kelakuan atau watak manusia (Bernard Williams, 1985: 1). Etika ini bertujuan mengarahkan manusia kepada pengenalan akan tujuan hidupnya sendiri. Artinya, tujuan hidupnya akan dicapai melalui keutamaan berupa keluhuran watak dan mutu pribadi setiap manusia, dan bukan pada apakah orang sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang ditentukan baginya.

Sebuah contoh dalam dunia filsafat mengenai etika keutamaan ini ialah etika yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, *keutamaan*

adalah *arete* yaitu suatu keunggulan atau keberhasilan dalam menjalankan fungsi khas sesuatu (Aristoteles, 1978: 8, 16-20). Berdasarkan etika Aristoteles ini, maka dalam bidang lingkungan hidup pencinta lingkungan dikatakan sebagai mempunyai *keutamaan* jika ia mampu memelihara, mengelola dan melestarikan lingkungan hidupnya dengan baik. Teknik atau alat pencegahan pencemaran mempunyai *arete* jika dapat bekerja dengan semestinya dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran. Bahkan dalam hal ini hukum lingkungan atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dikatakan mempunyai arete jika dapat berfungsi dengan baik dalam penegakannya.

Sebagaimana keutamaan pencinta lingkungan terletak pada kemampuannya dalam menjalankan fungsinya sebagai pencinta lingkungan dengan baik, alat dan hukum berfungsi sebagaimana mestinya, maka keutamaan manusia sebagai manusia terletak pada kemampuan atau kesuksesannya dalam menjalankan fungsi khas kemanusiaan. Menurut Aristoteles, fungsi khas ini terletak pada kegiatan akal budinya. Dengan pertimbangan dan keputusan akal budi ini, maka manusia dapat mencapai kebijaksanaan yang mengarahkannya untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan (*eudaimonia*) (Aristoteles, 1978: 15-29). Dengan demikian manusia yang menggunakan akal budinya dalam memperlakukan lingkungan hidupnya adalah manusia yang bijaksana, yang akan menuntunnya kepada kebahagiaan (*eudaimonia anthropine*). Hidup bahagia menurut Aristoteles ialah hidup menurut keutamaan dan hidup berkeutamaan itu terdiri dari usaha tak

henti-hentinya untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan manusiawi kita yaitu “bakat rasional” kita (P.A van der Weij, 1988: 39).

Filsafat etika Aristoteles itu barangkali sulit dipahami atau dilaksanakan, kecuali oleh Aristoteles sendiri. Alasannya ialah rasio yang dimaksud oleh Aristoteles adalah sesuatu “yang bersifat ilahi” yang ada dalam diri manusia yang aktivitasnya bersifat kotemplatif dan mesti dijalankan seumur hidup. Ini pula yang disebutnya sebagai keutamaan. Kehidupan rasional semacam ini adalah sesuatu yang bersifat adi-manusiawi dan hanya menjadi mungkin sejauh ada “yang ilahi dalam diri manusia itu”. Dengan kata lain, hidup seperti itu menurut dia adalah hidup serupa dengan Tuhan (van der weij, 1988: 39). Tampaknya inilah yang sulit dijalankan oleh manusia biasa saat ini, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Merusak atau mencemarkan lingkungan hidup adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri bukan pencemar atau perusak lingkungan hidup, melainkan Pencipta dan Ia Maha memelihara. Karena itu manusia pun harus turut memeliharanya karena lingkungan hidup adalah suatu “bentuk kesadaran manusia akan Tuhan yang mencipta dan pemeliharaan oleh manusia (Alex Seran & Embu Henriques, 1992: 65-80).

Selain itu, keutamaan menurut Aristoteles terletak pada perwujudan seluruh bakat-bakat yang paling baik dalam diri manusia, yang menjadikan manusia sungguh-sungguh manusia atau manusia dalam arti yang sepenuhnya, tanpa hubungan dan atau bantuan dari Tuhan. Humanisme duniawi ini cukup membingungkan karena di satu pihak berkeutamaan serupa dengan

Tuhan karena semuanya adalah hasil dari usaha sendiri (J. Rehmke, 1959: 56-59). *tetapi di pihak lain tanpa hubungan dengan Tuhan*

Dalam rangka mencari suatu etika keutamaan bidang lingkungan hidup saat ini, manusia tidak hanya dituntut untuk mencurahkan hidup rasional melalui bakat-bakat yang ada padanya, melainkan juga secara spiritual mempunyai keutamaan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Keutamaan ini bertujuan untuk menghindari manusia dari sikap dan pendekatan terhadap lingkungan hidup yang bersifat materialistik semata-mata. Etika Aristoteles dalam hal ini dapat menjadi referensi sejauh manusia harus mempunyai keunggulan atau keutamaan yaitu dalam melaksanakan fungsinya dengan baik, seperti yang disebutkan di atas. Namun hal ini perlu ditunjang dengan dimensi spiritual manusia, yaitu usaha menjalankan fungsi manusiawi (berfungsi bagi lingkungan hidup dan membuat lingkungan hidup berfungsi dengan baik) dan dengan mengadakan relasi dengan Tuhan penciptanya (Pierre Leroy, 1966: 13-42).

2. Etika Kewajiban

Etika kewajiban biasanya disebut juga sebagai etika peraturan, yaitu etika yang mengacu pada kewajiban moral yang mengikat manusia secara mutlak. Pada etika ini baik buruknya perilaku, atau benar salahnya suatu tindakan secara moral, diukur dari sesuai tidaknya prinsip atau aturan moral yang wajib dipatuhi tanpa syarat. Maka, etika ini disebut juga etika deontologis, seperti yang dianuti oleh Immanuel Kant, yaitu filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan itu sejalan dengan tugas dan

kewajiban yang relevan untuknya, tanpa perlu mengetahui atau memperhatikan akibat dari tindakan itu.

Kalau pada etika keutamaan fokus perhatian ditekankan pada kualitas watak atau mutu pribadi manusia sebagai pelaku moral, maka pada etika kewajiban ini fokus perhatiannya diletakkan pada ajaran atau prinsip-prinsip moral tindakan (J. Sudarminta, *Basis* 1991:163). Etika ini berhubungan dengan pernyataan : “apa yang harus atau wajib dilakukan, yang boleh atau tidak boleh dilakukan”. Untuk itu pengetahuan atau pengenalan akan ajaran-ajaran moral sangat bermanfaat untuk etika kewajiban ini. Dalam bidang lingkungan hidup dapat diberikan contoh etika kewajiban: “jangan mencemarkan sungai”, “peliharalah lingkungan hidup”, “taatilah peraturan, tidak boleh membuang limbah melebihi ketentuan Baku Mutu Lingkungan” dan seterusnya.

Etika kewajiban ini lebih menekankan pada perbuatan mentaati ajaran atau prinsip moral tersebut secara mutlak, apapun akibatnya. Menurut Kant, kewajiban ini adalah sesuatu yang bersifat *imperatif kategoris*. Dengan demikian jika orang ingin menilai tindakannya dari sudut moral, maka orang harus mengetahui apakah tindakan itu demi untuk kewajiban atau bukan. Menurut Kant, tindakan seseorang adalah baik menurut ajaran moral bukan karena tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pada paham etika keutamaan, melainkan dilakukan demi untuk memenuhi kewajiban semata-mata. Pada contoh prinsip “moral lingkungan” di atas, orang mentaatinya (tidak mencemarkan, melestarikan lingkungan, mentaati peraturan) adalah demi kewajiban semata-mata, tanpa ada maksud lain.

Sampai disini etika kewajiban Kantiaisme itu mungkin dapat diterapkan pada bidang lingkungan hidup. Namun yang sulit adalah usaha untuk mengetahui motivasi apa yang mendorong orang melakukan kewajiban itu, karena boleh jadi orang melakukan kewajibannya supaya mendapat hadiah, bukan karena kewajibannya.

Memang Kant membedakan antara *demi* kewajiban dan *sesuai* dengan kewajiban (T. Valentiner, 1965: 34). Menurut dia “demi kewajiban” lebih bermoral dari pada “sesuai kewajiban”, karena sesuai kewajiban adalah tindakan yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri. Misalnya orang tidak mencemarkan sungai yang jauh dari pengawasan (sebenarnya dapat dilakukannya) adalah *sesuai* dengan kewajibannya untuk memelihara lingkungan hidup. Menurut Kant tindakan itu belum mencerminkan perbuatan yang bernilai moral, kalau tindakan itu dikaitkan dengan tujuan tertentu, misalnya supaya mendapat penghargaan pemerintah. Sebaliknya tindakan itu berdimensi moral, jika dilakukan demi kewajiban semata-mata, yaitu kewajiban memelihara lingkungan hidup, tanpa dikaitkan dengan faktor untung-rugi, penghargaan dan sebagainya. Dalam bidang lingkungan hidup, seperti yang sedang dilakukan di Indonesia, perbedaan antara “sesuai” dengan “demi” kewajiban cukup sulit untuk ditemukan. Konsep insentif mendorong orang untuk berlomba-lomba melestarikan lingkungan. Tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan hadiah *Kalpataru* misalnya, tidak dapat dinilai sebagai “tidak bernilai moral: (menurut Kant) hanya karena dilakukan sesuai kewajibannya, dan bukannya demi kewajibannya. Tetapi

bagaimanapun tindakan demi kewajiban, tanpa maksud terselubung, lebih mencerminkan keunggulan perilaku manusia.



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

Bahwa etika merupakan sebuah “perangkat lunak” mengenai perilaku manusia telah diketahui secara universal. Dalam bidang lingkungan hidup, artinya sebagai salah satu aspek pembahasan tentang baik dan buruknya perilaku secara moral, etika ini merupakan pasangan yang tak kalah pentingnya disamping ketentuan formal hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu penelitian ini ingin “membuktikan” atau sekurang-kurangnya memberikan semacam gambaran atau kejelasan tentang arti pentingnya etika lingkungan hidup ini.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam filsafat etika merupakan bagian dari pengkajian filosofis yang terus menerus dilakukan. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang khusus membahas kualitas perilaku manusia (Darji Darmodiharjo, 1995: 7-8) atau merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan predikat-predikat nilai “betul” dan “salah” dalam arti “moral dan immoral” (Louis O. Kattsoff, 1989: 349). Dengan demikian, maka etika bukanlah sebuah cabang filsafat yang “berhenti”, melainkan terus-menerus dibahas dan dikaji sejalan dengan terus-menerusnya manusia berperilaku dan terus-menerusnya pula penilaian moral terhadap perilaku itu. Bahkan boleh juga dikatakan bahwa justru ketika perilaku manusia semakin lama semakin tidak dapat dipahami, atau ketika ilmu pengetahuan tentang manusia “berhenti”, atau malahan ketika perangkat-perangkat pengatur

perilaku manusia gagal merubah manusia itu sendiri, maka etika sebagai filsafat tentang ajaran moral “dimulai”, sebagaimana dikatakan oleh Karl Jaspers, bahwa “filsafat dimulai ketika ilmu pengetahuan berhenti (Harry Hammersma, 1985: ix). Maka meskipun bukan jawaban final tentang perilaku manusia, etika dapat dimintai bantuannya, dapat dilihat sebagai sebuah kemungkinan jawaban.

Demikian pula halnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai sesuatu yang bernilai, lingkungan hidup juga tergantung pada bagaimana sifat atau kualitas perilaku manusia terhadapnya. Semakin baik perilaku manusia terhadapnya, maka semakin terjaminlah kualitasnya. Sebaliknya, semakin buruk perilaku manusia, semakin buruk bahkan hancur pula kualitasnya. Sebagaimana bukan rahasia lagi bahwa dewasa ini justru kualitas lingkungan telah turun dan kehancuran atau degradasi ekologis semakin menjadi-jadi, yang penyebab paling hakikinya adalah perilaku manusia. Karena itu kebutuhan akan suatu etika lingkungan menjadi hal yang niscaya.

Penulis menyadari bahwa tidak gampang pula menetapkan suatu etika lingkungan hidup. Ada banyak jenis atau sifat etika yang dikenal dalam berbagai literatur tentang etika, seperti etika keutamaan, kewajiban, deskriptif dan normatif (baik yang umum maupun yang khusus). Karena itu penulis mencoba melakukan semacam penelaahan apakah etika lingkungan hidup itu, dan manakah sifat etika lingkungan hidup: keutamaan, kewajiban, deskriptif ataukah normatif. Hal ini juga bertolak dari kenyataan bahwa di Indonesia misalnya, belum pernah jelas tentang etika lingkungan hidup, kecuali di sana-

sini terdengar ucapan tentang perlunya suatu etika lingkungan hidup bagi perilaku manusia Indonesia dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya (A. Sony Keraf, *Ozon*, Desember 1999). Selain itu juga belum pernah jelas benar tentang keseragaman pemahaman tentang sifat-sifat etika lingkungan hidup, terutama apakah “keutamaan” ataukah “kewajiban”.

Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara kritis dan memaparkan tentang apakah etika lingkungan hidup itu, dan apakah sifat-sifat dari etika lingkungan hidup Indonesia. Disamping itu tujuan penelitian ini selain mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pandangan dalam atau tentang etika, juga berusaha untuk melakukan evaluasi kritis tentang kekuatan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing pandangan, yang kemudian mendapatkan semacam sintesis dari pandangan-pandangan itu.

B. Manfaat

Bidang penelitian ini adalah etika atau filsafat tentang ajaran moral. Hasil penelitian yang diperoleh lebih bersifat *kognitif* dari pada afektif. Karena itu manfaat atau kegunaan yang lebih dominan dari penelitian ini adalah memperkaya dan mengembangkan pengetahuan, khususnya tentang etika lingkungan hidup. Artinya penelitian ini bukan merupakan penelitian yang telah ^{final} sifatnya, melainkan suatu penelitian awal dan membuka kemungkinan bagi mereka yang berminat di bidang filsafat moral untuk terus mengembangkannya.

Disamping itu, manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat mempertimbangkan segi-segi etika dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bagi individu atau

masyarakat, penelitian ini juga bermanfaat agar orang dapat memahami setiap perilakunya terhadap lingkungan hidup, bagaimana ia harus bersikap, apakah moralitasnya.

Pada akhirnya penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi setiap Organisasi Lingkungan Hidup (Orling) atau LSM-LSM bidang lingkungan agar mereka pun berpartisipasi dalam mensosialisasikan etika lingkungan hidup kepada masyarakat luas. Juga tidak kalah pentingnya ialah bagi para penegak hukum dan para penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membawa dampak langsung bagi lingkungan hidup. Mereka diharapkan tahu tentang keutamaan dan kewajiban-kewajiban normatif yang mesti dimiliki dan diwujudkannyatakan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dasar (*basic research*) berkenaan dengan pengembangan teori etika, khususnya etika lingkungan hidup. Karena bidang yang diteliti adalah filsafat, maka sifat penelitian ini mengikuti sifat penelitian filsafat, antara lain, yaitu *kritis* berupa analisa pendapat dan *skolastik* (sintesis-deduktif), yaitu bertitik tolak dari definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya, ditarik kesimpulan-kesimpulan (Anton Baker, 1984: 21-22).

Dalam penelitian tentang konsep atau pendapat-pendapat dikemukakan banyak pendapat filsuf (dalam hal ini mereka yang menekuni filsafat) untuk menemukan kedudukan konsep atau pendapat itu dalam filsafat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah konsep atau pendapat-pendapat tentang etika, kemudian diketahui etika lingkungan hidup.

Dengan mengikuti pendapat atau pikiran-pikiran filsuf-filsuf itu sudah dengan sendirinya terjamin objek formal filosofis. Dalam pikiran mereka sudah termuat *semua unsur metodis umum* seperti berlaku bagi pemikiran filosofis, termasuk *metode komparasi*, yaitu membandingkan pandangan-pandangan para filsuf (Anton Baker, 1990: 85). Berkaitan dengan soal etika, maka dikemukakan pandangan-pandangan tentang konsep etika.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pertama-tama dicari segala buku yang ada mengenai tokoh dan topik yang bersangkutan. Dimulai dari karya tokoh-tokoh itu pribadi (*pustaka primer*), dan dengan monografi

serta karangan khusus tentang tokoh dan filsafatnya (*pustaka sekunder*). Kemudian dicari dalam buku-buku umum; seperti sejarah filsafat, kamus filsafat dan ensiklopedi serta pengantar-pengantar filsafat etika. Adapun buku-buku yang dijadikan bahan penelitian terdiri atas:

- a). buku-buku yang memuat uraian tentang Etika Keutamaan dan Etika Kewajiban beserta tokohnya.
- b). buku-buku mengenai etika pada umumnya atau buku-buku tentang filsafat moral.
- c). buku-buku tentang filsafat pada umumnya, sejarah filsafat atau kamus filsafat.
- d). Majalah-majalah filsafat
- e). Surat kabar. Dalam hal ini adalah artikel penulis sendiri yang pernah diterbitkan di Harian Suara Pembaruan.

Sesuai dengan judul bahwa penelitian ini tentang perbandingan Etika Keutamaan dan Etika Kewajiban maka, sifat penelitian adalah kritis-skolastik, dengan menggunakan *metode komparasi* yang ditopang dengan aspek-aspek penting metodologis sebagai berikut:

a. Interpretasi

Masing-masing pandangan atau visi yang dibandingkan dipahami menurut warna dan keunikannya sendiri-sendiri. Tetapi dari awal diberi tekanan pada segi-segi yang relevan bagi tema yang dikomparasikan.

b. Induksi dan deduksi

Dalam suatu analisis yang teliti diselidiki arti semua konsep dalam pandangan-pandangan yang bersangkutan dan dibentuk suatu sintesis

pemikiran itu yang meliputi semua unsur itu secara seimbang (*induksi*). Sebaliknya juga pemahaman sintesis yang telah diperoleh dipergunakan untuk dengan lebih baik mengerti semua detail dalam pandangan itu (*deduksi*). Di sini penulis juga turut terlibat. Dan dalam keterlibatan itu penulis berusaha untuk turut memikirkan dan melihat pandangan itu tanpa kehilangan objektivitasnya.

Dalam rangka komparasi antara pandangan-pandangan itu secara khusus diperhatikan detail-detail yang berhubungan dengan tema atau pokok masalah. Hal itu sangat penting dalam pembentukan sintesis (*induksi*), tetapi juga mendapat artinya yang spesial oleh karena kedudukannya dalam sintesis itu (*deduksi*).

c. Idealisasi

Masing-masing pandangan atau pendapat dicoba dipahami menurut dinamika dan inti yang semurni mungkin. Di satu pihak hanya dalam kemurnian itu mereka dapat dibandingkan secara jujur, dan di pihak lain justeru perbandingannya dengan lebih tepat akan memperlihatkan orientasi sebenarnya dari masing-masing pandangan.

d. Komparasi

Yang dimaksud dengan komparasi disini adalah komparasi *simetris*. Artinya perbandingan dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan selengkap mungkin. Dalam penelitian ini masing-masing tentang etika jenis atau sifat-sifatnya dicoba untuk disajikan terlebih dahulu kemudian diadakan perbandingan. Dalam perbandingan itu, ada juga unsur *asimetris*-nya, yaitu perbandingan dibuat dengan

menguraikan terlebih dahulu pandangan pertama secara lengkap. Kemudian, sambil memberikan deskripsi tentang pandangan kedua, langsung dibuat perbandingan dengan yang pertama.

e. Heuristika

Berdasarkan perbandingan antara beberapa pandangan tentang etika, dapat muncul suatu pemahaman baru tentang etika lingkungan hidup, entah menyangkut seluruh orientasi filsafat tokoh tertentu, atau mengenai salah satu bagian saja.

f. Deskripsi

Pemikiran masing-masing filsuf tentang etika atau moral diuraikan sebagaimana adanya. Kekurang-lengkapan semua pandangan atau pemikiran tokoh-tokoh filsafat itu hanya karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun itu tidak mengurangi hal pokok dalam pemikiran para filsuf itu sehingga kesamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka tetap dapat disajikan secara jernih dan tepat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang mempunyai beberapa arti : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Disamping itu, kata ethos ini (dalam bentuk jamak *ta etha*) berarti adat kebiasaan (K. Bertens, 2000 : 4).

Berdasarkan “tempat asalnya,” etika ini berakar dari filsafat Yunani (± tahun 490-an Sebelum Masehi Oleh para murid Phytagoras). Dapat dikatakan bahwa pada saat itu etika tidak berurusan dengan hal-hal fisik, melainkan sesuatu yang bersifat rohani, berkaitan dengan aspek spiritualitas manusia (Magnis- Suseno, 1997 : 1). Maka dalam filsafat Yunani pula etika ini adalah semacam studi tentang kebiasaan-kebiasaan manusia (*Customs*), ide-ide tentang yang baik dan bentuk pada manusia (A. Fagothey, 1953 : 18,36).

Dalam perkembangannya, etika diartikan juga sebagai studi tentang benar dan salah dalam tingkah laku manusia (ada juga yang menyatakan tentang “baik dan buruk”-nya perilaku manusia). Dalam hal ini perilaku manusia dijadikan semacam objek *materil* penelitian etika dengan kebenaran/keharusan dan kesalahan sebagai objek *formilnya*. Jika demikian, maka penelitian tentang etika ini berdasarkan pola pikir *deduktif*. Artinya, ada semacam penilaian “subjektif,” konseptuil terhadap perilaku riil manusia berdasarkan pada prinsip-prinsip moral tertentu.

Meskipun dalam konteks ilmiah, etika dartikan sebagai suatu “studi” namun pengertian etika tidak terbatas pada ilmu saja. Ada beberapa pengertian etika yang dapat dijumpai dalam berbagai arti sebagai berikut (K. Bertens, *Ibid.*,: 6-12).

Pertama, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa etika adalah “sistem nilai” (menyangkut nilai-nilai) yang dianut baik oleh individu maupun oleh masyarakat (nilai sosial). Disamping itu, dari pengertian itu jumlah etika “sama” dengan moral / prinsip-prinsip moral tertentu yang dipegang, yang dijadikan pedoman berperilaku.

Kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Dalam konteks ini, etika adalah semacam “kode etik.” Katakanlah semacam kode etik profesi-profesi tertentu (misalnya profesi advokat). Ada prinsip-prinsip etis tertentu yang mesti dipegang oleh para advokat itu.

Ketiga, sebagai suatu ilmu etika adalah ilmu tentang yang baik atau buruk. Asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk yang diterima dalam suatu penelitian sistematis dan metodis. Dengan kata lain, sebagai suatu ilmu etika adalah filsafat tentang ajaran moral.

1. Moral

Sebuah istilah yang sering dipergunakan dan bahkan sering disamakan dengan etika adalah *moral*. Moral secara prinsipil berbeda dengan etika. Moral adalah “Keseluruhan aturan, kaedah atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan (H.De Vos, 1987 : 1,3). Dengan demikian, maka

sebenarnya dalam arti tertentu moral menjadi sama dengan hukum yang berisi perintah dan larangan. Di lain pihak moral berusaha menjawab pertanyaan “bagaimana orang harus hidup, apa yang boleh, tidak boleh wajib, tidak wajib dilakukan atau diperbuat manusia (Magnis-Suseno, 1991:10). Sebaliknya etika berurusan dengan bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Maka etika disini menjadi filsafat tentang ajaran moral.

2. Moralitas

Salah satu bagian dari etika adalah moralitas. Dalam *Webster's Desk Dictionary* (1983) moralitas (morality) diartikan sebagai *Conformity to the rules of right or wrong conduct* atau *moral quality or conduct*. Berdasarkan pengertian ini, maka moralitas adalah semacam penyesuaian terhadap aturan tentang benar dan salahnya perilaku. Atau bisa juga disebut kualitas perilaku atau tindakan manusia.

Bila etika adalah “filsafat tentang ajaran moral” atau kajian akademis terhadap prinsip-prinsip moral, sementara moral adalah “ketentuan-ketentuan” perilaku, atau prinsip-prinsip tindakan yang harus diikuti, maka moralitas berkaitan dengan kualitas atau mutu perilaku manusia. Dalam kajian tentang moralitas, dikenal adanya beberapa sifat moralitas, misalnya saja moralitas *subjektif* dan moralitas *ekstrinsik*. Moralitas subjektif berkaitan dengan baik buruk / benar salahnya tindakan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, latar belakang hidup (sosial-budaya) dan stabilitas emosi dari subjek. Berkaitan dengan bidang lingkungan hidup misalnya, maka kualitas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap lingkungan hidup (perawatan, pelestarian atau bahkan perusakan / pencemaran) sangat tergantung pada

pemahaman / pengetahuan mereka terhadap lingkungan hidup, latar belakang dan stabilitas emosi (bagaimana reaksi atau sifat-sifat “kepribadian” mereka) dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.

Di lain pihak moralitas ekstrinsik berbicara tentang kualitas tindakan manusia yang dinilai berdasarkan pada konformitas terhadap perintah dan larangan yang ada dalam hukum positif. Artinya, benar dan salah, baik dan buruknya suatu perilaku dilihat dari ketaatan terhadap ketentuan hukum positif. Maka dalam hal ini hukum positif menjadi patokan atau “ukuran moral” perilaku. Penetapan atau pemantapan substansi hukum positif menjadi amat penting dalam moralitas ekstrinsik ini. Namun yang menjadi masalah dalam moralitas ekstrinsik ini adalah bahwa karena hukum positif mengatur perbuatan lahir manusia (tidak mengatur suasana batin) maka timbul kesulitan untuk menilai kualitas moral yang sesungguhnya dari manusia. Sebab moralitas tidak hanya menyangkut perbuatan lahir saja, melainkan berkaitan erat dengan seluruh kepribadian manusia beserta motivasi-motivasi tindakan yang dilakukan. Bisa saja terjadi bahwa ketaatan terhadap hukum positif bukan karena kesadaran moral melainkan misalnya karena rasa takut dihukum atau sekedar ingin mendapat pujian dan penghargaan.

Sama halnya juga dalam bidang lingkungan hidup. Kualitas tindakan moral terhadap lingkungan dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Orang mengikuti ketentuan hukum hanya karena desakan kewajiban hukum semata-mata dan dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*). Moralitas ini pun lalu bersifat relatif. Baik-buruknya perilaku atau benar dan salahnya tindakan tergantung pada apa yang dikatakan benar

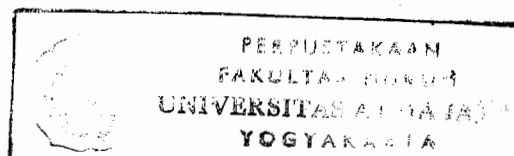
dan salah, baik dan buruk dalam hukum positif. Hal ini juga berarti kualitas moral (moralitas ekstrinsik) bisa berubah-ubah menurut perubahan hukum (atau juga ketidakberlakuan hukum) positif yang memang selalu berubah-ubah.

B. Pembagian Etika

Dari berbagai literatur, etika dapat dibagi berdasarkan periode, yaitu etika klasik dan modern. Yang dapat disebut etika klasik adalah etika *keutamaan* Aristoteles (Bernard Williams, 1985: 1) dan etika kewajiban Immanuel Kant (I. Kant /T. Valentiner, 1965: 34).

Etika keutamaan adalah teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak berurusan dengan *benar dan salahnya* tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan *baik dan buruknya* perilaku atau watak manusia (Bernard Williams, *ibid.*). Etika ini lebih menekankan pada keunggulan kualitas perilaku dan "mutu manusia". Tersedia dan tidaknya prinsip-prinsip moral tertentu dalam masyarakat tidak menjadi perhatian utama dari etika ini. Yang terpenting adalah faktor *manusia* dan *kepribadiannya*. Artinya manusialah yang menjadi tolak ukur untuk menentukan moralitas perilaku dan tindakan, menurut Aristoteles (1978: 8) manusia mesti mengenal tujuan hidupnya, mencari kebahagiaan atau keutamaan melalui pengenalan akan hal-hal yang baik melalui kegiatan akal budinya.

Sementara itu etika kewajiban berbeda dari etika keutamaan. Etika kewajiban - atau disebut juga etika peraturan adalah suatu teori etika yang berpendapat bahwa baik-buruk, benar dan salahnya tindakan diukur dari



sesuai tidaknya tindakan itu dengan prinsip-prinsip moral yang wajib dipatuhi tanpa syarat. Menurut I. Kant penyesuaian tindakan terhadap prinsi-prinsip moral bersifat *Imperatif Kategoris* atau bersifat “keharusan” (L. Tjahjadi, 1991). Menurut J. Sudarminia (1991:163), etika kewajiban menekankan pada prinsip-prinsip moral atau pengenalan pada prinsip-prinsip moral, bukan pada mutu atau kualitas manusia.

Selanjutnya yang dapat dikatakan sebagai pembagian etika modern adalah etika *deskriptif*, *normatif* dan *metaetika* (K. Bertens, *ibid.*, hal :15-22). Etika deskriptif adalah etika yang mempelajari moralitas sebagaimana adanya dalam individu, kebudayaan tertentu, dalam suatu sejarah dan sebagainya. Dengan kata lain, etika deskriptif ini mempelajari sejarah kesusilaan atau fenomena-fenomena kesusilaan. Yang khas dari etika ini adalah bahwa etika ini hanya memberikan gambaran atau pelukisan saja, tanpa memberikan *penilaian*. Misalnya kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar hutan atau sistem perladangan berpindah pada masyarakat tertentu yang merusak lingkungan, hanya dilukiskan saja oleh etika ini tanpa memberikan penilaian apakah tindakan semacam itu perlu diterima ataukah harus ditolak.

Walaupun etika deskriptif tidak memberikan penilaian moral, (baik buruk, benar dan salahnya tindakan), etika ini tetap penting dalam arti memberikan kontribusi pengetahuan atau pemahaman mengenai perilaku-perilaku tertentu manusia dalam suatu masyarakat. Studi-studi tentang latar-belakang historis, sosiologis dan kultural masyarakat yang melahirkan perilaku-perilaku tertentu membawa orang kepada pemahaman dan penilaian (berdasarkan etika normatif) tentang mengapa suatu tindakan perlu dilakukan,

dianggap baik, benar dan juga mengapa tidak boleh dilakukan, dianggap buruk, jahat dan sebagainya.

Kemudian etika normatif adalah bagian yang terpenting dari etika dan pembahasan-pembahasan moral dewasa ini. Tidak seperti etika deskriptif yang bersifat melukiskan saja, etika normatif ini justru memberikan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak lagi hanya melukiskan kebiasaan membakar hutan atau sistem perladangan berpindah pada masyarakat tertentu, melainkan ia pun sekaligus menolak kebiasaan itu karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan. Penilaian yang dibuat oleh etika ini berdasarkan pada norma-norma. Misalnya “lestarikanlah fungsi lingkungan” sebagai salah satu contoh norma. Dengan demikian, maka etika normatif ini tidak bersifat deskriptif melainkan preskriptif (memerintah), tidak melukiskan melainkan menentukan benar dan tidaknya tingkah laku atau anggapan moral.

Etika normatif ini dapat dibagi lagi dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas beberapa tema seperti apa itu norma etis, hubungan antar norma satu sama lain, mengapa norma moral mengikat dan sebagainya. Bisa juga dikatakan bahwa etika umum ini bersifat teoritis: berisi sejumlah teori tentang (moral. Sebaliknya etika khusus yang dewasa ini disebut juga “etika terapan (*applied ethics*)” adalah etika yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Sifat “praktis”nya membuat etika ini menjadi populer dan gampang dilaksanakan. Tampaknya etika lingkungan hidup pun adalah “etika normatif yang khusus”. Norma lingkungan sebagai patokan diterapkan pada

perilaku faktual manusia terhadap lingkungan hidup untuk menarik kesimpulan etis yang bersifat normatif pula.

Dalam batasan tertentu, misalnya dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban moral, etika normatif ini identik dengan etika kewajiban I. Kant. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, etika kewajiban I. Kant lebih memfokuskan perhatian pada “tersedianya norma atau prinsip-prinsip moral tindakan dan kewajiban tanpa syarat, tanpa dikaitkan dengan kualitas manusia untuk mengikuti prinsip-prinsip moral itu”. Moralitas yang muncul di sini pun adalah moralitas ekstrinsik. Demikian pula halnya dengan etika normatif yang justeru dapat memberikan penilaian moral terhadap suatu tindakan setelah tindakan itu dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan norma-norma moral yang ada. Baik etika normatif maupun moralitas ekstrinsik sama-sama berpegang pada norma-norma (atau yang dianggap sebagai norma moral) yang telah ada. Karena itu bisa ada penilaian mengenai benar-salah, baik dan buruknya suatu tindakan, bermoral atau tidak bermoral.

C. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara yuridis formal pengertian pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan dalam pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPH) sebagai “upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.”

Meskipun dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 dinyatakan “cukup jelas”, namun tentang pengertian pengelolaan lingkungan ini perlu dijelaskan mengingat pengelolaan lingkungan hidup juga berkaitan dengan dimensi etis

perilaku manusia. Pengelolaan lingkungan hidup disebut sebagai Kebijaksanaan (*wisdom, weisheit, sophia*), bukan kebijakan (*policy*). Dalam dunia filsafat, kebijaksanaan adalah sesuatu yang senantiasa dicari, direfleksikan atau dibahas oleh para filsuf, sehingga mereka sering disebut sebagai orang-orang yang mencintai kebijaksanaan (*philosophia*). Kebijaksanaan yang dimaksud adalah “kepandaian (manusia) menggunakan akal-budi, pengalaman dan pengetahuan” (KBBI, 1988).

Kebijaksanaan yang dimaksud itu pun pada prinsipnya adalah untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang “bermoral”, bukan untuk hal-hal yang buruk atau jahat (*H. Rhiti, 2001*). Kebijaksanaan juga berarti *knowledge of what is true or right coupled with good judgment* (*Webster's Desk Dictionary, 1990*). Maka dalam kebijaksanaan dibutuhkan pengetahuan dan pertimbangan-pertimbangan yang baik, penggunaan rasio dan rasionalitas. Dari sudut pandang moralitas, maka suatu tindakan yang bijaksana adalah tindakan moralitas yang subjektif. Pengetahuan, pengalaman dan rasionalitas turut menentukan kualitas moral tindakan. Bahkan rasionalitas ini merupakan salah satu unsur penting dalam kebijaksanaan. Maksudnya, rasio merupakan pusat seluruh pertimbangan (benar-salah, baik dan buruk), pusat kawasan mencerna kenyataan. Dengan kata lain, rasio dan keputusan ditautkan oleh proses berpikir dan memutuskan diri yang pada intinya bersumber pada kesadaran sang manusia penentu putusan dan penimbang wawasan hidupnya (*Muji Sutrisno, 1997: 19*).

Kebijaksanaan sebagaimana dikemukakan di atas itulah yang mau ditempatkan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Sebab, mustahil

kebijaksanaan yang memiliki dimensi etis disalahpahami sebagai sekedar "kebijakan" saja (yang bisa saja justru tidak bijak). Sebagaimana disebutkan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dengan kata lain, semuanya itu dilakukan dalam kebijaksanaan. Artinya, adanya kepandaian menggunakan akal-budi (rasio) pengalaman dan pengetahuan dalam menata, memanfaatkan, mengawasi dan mengendalikan lingkungan hidup.

Upaya-upaya tersebut selain dilakukan pemerintah dalam sistem kelembagaan formal, juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam UUPLH masyarakat diberi kesempatan atau hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Dengan demikian, maka dimensi etis pengelolaan lingkungan hidup* tidak hanya harus diperhatikan pemerintah melainkan juga menuntut perhatian pemerintah individu dan masyarakat luas. Prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan merupakan kewajiban moral setiap individu. Disamping ada hak yang sama setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ada kewajiban setiap orang untuk menjaga, merawat atau melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakannya (Pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 UUPLH).

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 4 UUPLH adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.

2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya negara kesatuan RI dari dampak usaha dan / atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup

Bila sasaran-sasaran pengelolaan lingkungan hidup tersebut di atas dicermati maka dapat dikatakan bahwa secara implisit terdapat unsur-unsur moral lingkungan yang perlu dipegang teguh dan diwujudkan dalam perilaku konkrit manusia Indonesia. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup merupakan tujuan ideal dan mengandung makna filosofis hakekat eksistensi. Dalam eksistensialisme disebutkan bahwa tidak hanya ada kesadaran bahwa manusia *men-dunia* (*in der Welt Sein*) melainkan juga ada kesadaran bahwa dalam *men-dunia* itu manusia mengadakan relasi dengan dunia yang berada pada dirinya sendiri (A. Baker, 1995 : 28-29). Tentu membangun relasi yang benar ialah tidak dengan jalan merusak atau mencemari dunia (baca : lingkungan hidup) tempat manusia bereksistensi, melainkan dengan *memelihara*. Martin Heidegger dalam *Sein und Zeit* mengatakan bahwa pemeliharaan (*sorge*) merupakan suatu sifat hakiki seluruh eksistensi manusia sedemikian rupa, sehingga sifat ini menyatukan seluruh unsur hidup (Huijbers, 1986 : 31).

Maka mendunia adalah memelihara, termasuk memelihara atau merawat dunia yang sudah parah.

Pemeliharaan sebagai bentuk kebijaksanaan hidup yang melahirkan keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup adalah prinsip moral yang apabila dipegang teguh akan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ini pun merupakan sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

Disamping keselarasan dan keserasian, unsur moral lingkungan hidup yang lainnya ialah terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Sejak munculnya gerakan lingkungan di awal tahun 1960-an, sudah dibicarakan kepentingan-kepentingan generasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Justeru gerakan lingkungan pada waktu itu lebih merupakan sebuah gerakan moral (H. Rheti, *Suara Pembaruan*, 22 April 2000). Gerakan tersebut kemudian mendapat sambutan serius dari WCED (1988) dengan konsep *Sustainable development*-nya, yaitu pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, melainkan juga generasi-generasi yang akan datang. Selanjutnya dalam kajian moral sosial, tanggung jawab kepada generasi yang akan datang merupakan suatu kewajiban moral generasi sekarang ini (Virginia Held, 1989: 237).

Diasumsikan bahwa bila pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diartikan diatas, dilakukan dengan paradigma kebijaksanaan, yang tidak lain merupakan salah satu *prinsip etis perilaku ekologis*, maka semua sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan akan dapat terwujud.

Untuk mewujudkannya tidak hanya dibutuhkan berbagai perangkat keras seperti teknologi, kebijakan ekonomi dan hukum yang semuanya mesti mengandung keunggulan kualitas (Aristoteles: Arete), melainkan juga “hati nurani” atau moralitas intrinsik yang mendorong orang kepada perilaku yang baik, adil, arif dan bijaksana.

D. Perbandingan etika

Sebelum menentukan apakah sifat etika lingkungan hidup, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang moral lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa moral merupakan “Substansi” dari etika. Tanpa moral etika tidak dapat mengkaji objeknya (H.Rhiti, *Suara Pembaruan* 20/5-1997).

1. Moral Lingkungan

Apakah moral lingkungan hidup itu? Sebagaimana dikemukakan sebelumnya (tentang perbedaan etika dan moral), moral merupakan “prinsip-prinsip tentang apa yang baik, yang boleh, yang wajib dilakukan, yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan (Magnis Suseno, 1991, *ibid.*,). Atau moral merupakan prinsip-prinsip batin, menyangkut kebaikan, dan pelaksanaan tugas-tugas dengan baik (*morality of duty*) (Lon L. Fuller, 1963 : 32). Yang disebut ukuran moral adalah *hati nurani* dan *norma*. Hati nurani menyediakan ukuran yang subjektif, sementara norma menunjuk pada ukuran yang objektif (umum). Hati nurani memberi tahu kepada manusia mana yang benar, sedang norma diberikan untuk menunjukkan kepada semua orang mana yang benar itu (Purwa Hadiwardoyo, 1990: 14-15).

Berdasarkan pada pengertian moral di atas, maka moral lingkungan adalah prinsip-prinsip atau bahkan ketentuan-ketentuan tentang apa yang baik

yang harus atau wajib dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup, misalnya merawat, mengkonservasi, melestarikan dan mengelola lingkungan dengan baik. Di samping itu moral lingkungan juga berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan manusia. Misalnya orang tidak boleh mencemari, merusak lingkungan, tidak boleh membuang sampah atau limbah ke media lingkungan secara sembarangan, tanpa pengelolaan, juga orang tidak boleh mengeksploitasi sumber-sumber daya alam secara berlebih-lebihan, tidak bertanggung jawab dan tanpa kebijaksanaan.

Dari pengertian moral lingkungan itu dapat pula dikatakan bahwa ukuran moral lingkungan adalah *hati nurani* dan *norma*. Norma atau kaedah di sini adalah patokan, atau ketentuan objektif dan umum yang diberikan kepada manusia supaya memahami kebaikan atau perbuatan baik di bidang lingkungan hidup dan manusia dituntut supaya berperilaku sesuai dengan kebaikan itu. Dengan demikian maka norma di sini “sama” dengan ketentuan hukum lingkungan yang objektif dan umum. Di Indonesia norma semacam itu dapat dijumpai dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, yang berisi perintah dan larangan atau berbagai kewajiban di bidang lingkungan hidup. Masalah yang timbul adalah apakah norma-norma lingkungan hidup itu sekaligus merupakan ketentuan moral lingkungan hidup? Tampaknya sulit untuk mengatakannya demikian. Di Indonesia yang berpegang pada paradigma positivisme hukum norma lingkungan hidup itu adalah ketentuan hukum positif dan tidak pernah dikatakan sebagai moral lingkungan. Dengan kata lain, ada pembedaan yang tegas antara hukum dan

moral (Sudikno Mertokusumo, 1991: 10-11). Meskipun begitu norma-norma itu telah memberikan semacam pedoman atau patokan perilaku yang baik bagi manusia Indonesia di bidang lingkungan hidup. Selain itu pula, dari sudut pandang etika kewajiban I. Kant, boleh dikatakan bahwa pelaksanaan norma-norma itu dalam perilaku konkrit di bidang lingkungan hidup membawa pencapaian sasaran *moralitas demi kewajiban*, sebagaimana dimaksudkan I. Kant (H. Rihiti, 1996: 8), meskipun secara teoritis norma-norma lingkungan hidup itu bukanlah “daftar” prinsip moral lingkungan.

Kemudian hati nurani yang merupakan “sumber otentik” moralitas perilaku manusia akan mengatakan secara lebih tegas kepada manusia tentang kebaikan-kebaikan yang harus dikejar. Meskipun ratusan norma di bidang lingkungan hidup telah ditetapkan, namun tanpa fungsi hati nurani manusia sendiri, norma-norma itu tidak akan berguna dalam mencapai tujuannya. Hati nurani (dan kesadaran) ini secara jelas atau sayup-sayup memberitahukan kepada manusia manakah tindakan yang sepantasnya dilakukan. Ada semacam “bisikan dari dalam” yang mengatakan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hubungannya dengan norma ialah bahwa karena hati nurani dapat keliru atau tumpul, maka orang tetap perlu belajar atau mengetahui norma-norma yang secara formal ditetapkan. Walaupun norma-norma itu pun bisa saja keliru, namun tujuannya untuk membantu perilaku, dan hati nurani dalam mencari kebaikan moral di bidang lingkungan hidup (Purwa Hadiwardaya, *ibid.*, hal. 15).

Masih berkaitan dengan moral lingkungan hidup dapatlah juga dikatakan di sini sekurang-kurangnya dua hal. *Pertama*, moral lingkungan

berhubungan dengan kewajiban-kewajiban di bidang lingkungan hidup. Pemenuhan kewajiban-kewajiban itu menjadi semacam “tolak ukur” penilaian moral seseorang di bidang itu. Jika orang (orang perorangan, badan hukum dan kelompok masyarakat) menjalankan kewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup, mengolah limbah, membuat AMDAL, mengikuti ketentuan Baku Mutu Lingkungan (BML) misalnya, maka orang tersebut tidak hanya telah melaksanakan norma hukum (secara lahiriah), melainkan tindakannya itu pun disebut “bermoral”. Sebaliknya jika ia tidak menjalankan kewajibannya dan membawa akibat yang negatif bagi lingkungan hidupnya, maka bisa saja tindakannya dinilai sebagai *immoral*. Memang bisa saja orang menyatakan bahwa tindakan itu adalah amoral (non-moral atau di luar konteks moral), yaitu semata-mata merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Namun justru motivasi di balik tindakan itu secara batiniah adalah tindakan di luar pertimbangan hati nurani (moral).

Kedua, penetapan atau penataan moral lingkungan bertujuan untuk membiasakan adanya tingkah laku yang baik. Perilaku yang baik dalam bidang lingkungan hidup membutuhkan juga pengertian atau pengetahuan akan lingkungan hidup itu sendiri. Artinya, perilaku yang baik terhadap lingkungan hidup tidak timbul hanya karena moral lingkungan (dengan ukuran hati nurani dan norma) melainkan juga karena pengetahuan dan pengertian manusia akan lingkungan hidupnya sendiri. Di sini orang mesti menyadari arti pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupannya, atau bahwa dia merupakan bagian integral lingkungan hidupnya. Kesadaran ekologis semacam ini membawa implikasi pada adanya kesadaran manusia untuk

merawat “habitat” atau lingkungan hidupnya sendiri. Justeru ini merupakan keunggulan manusia atau keutamaan manusia menurut etika keutamaan Aristoteles. Artinya perilaku yang baik yang ada pada manusia karena mutu atau kualitas pribadi, kesadaran rasional (akal-budi) pada manusia, dan bukan pada sejumlah rumusan moral dan pendiktean dari luar (Aristoteles, 1978, *ibid-*). Dengan demikian, maka pengetahuan akan yang baik dan benar (tentang lingkungan hidup) merupakan faktor penentu atau bahkan syarat adanya moral lingkungan.

William Chang OFM Cap dalam bukunya *Moral Lingkungan Hidup* (2001) juga berpendapat bahwa moral lingkungan lahir dari kesadaran, pengetahuan dan pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Mengutip pendapat Eugene P. Odum, moral lingkungan menurutnya adalah “pertimbangan filosofis dan biologis mengenai hubungan manusia dengan tempat tinggalnya dan semua makhluk non-manusia. Dalam masyarakat beradab, moral ini menuntun manusia untuk meninjau kembali sejumlah gagasan yang benar dan salah mengenai tingkah laku manusia terhadap alam sekitarnya (W. Chang, 2001 : 34). Jelas bahwa pengetahuan manusia akan lingkungan hidupnya sendiri sangat menentukan moralitas perilakunya terhadap lingkungan hidup, disamping pertimbangan-pertimbangan tentang benar dan salah mengenai apa yang akan dilakukan terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya dikemukakan juga bahwa moral lingkungan hidup adalah moral belas kasih. Maksudnya moral lingkungan hidup melahirkan “sentimen” dan simpati terhadap lingkungan hidup beserta seluruh isinya.

Peran rasio atau akal budi dikesampingkan oleh moral ini, sebagaimana dikatakan David Hume (1711-1776) yang menolak etika rasionalistik, yaitu bukan akal-budi yang menyelamatkan lingkungan hidup, melainkan simpati, perasaan atau sentimen manusia. Dengan kata lain, baik-buruknya perilaku manusia terhadap lingkungan hidup lebih ditentukan oleh perasaan. Selain moral belas kasih, moral lingkungan hidup merupakan *an expansion of every branch of ethics* (pengembangan cabang moral). Di sini setiap bidang etika kehidupan sosial (termasuk ekonomi) manusia merupakan “moral lingkungan hidup”, yaitu perluasan perhatian terhadap bentuk-bentuk kehidupan. Akhirnya moral lingkungan hidup merupakan suatu keharusan bertindak. Artinya moral lingkungan hidup memusatkan usaha dan kegiatannya pada apa yang seharusnya dilakukan manusia dan sikap yang seharusnya diambil manusia untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan alam atau dunia bendawi (William Chang, *ibid.*: 34-38).

2. Sifat Etika Lingkungan Hidup

Setelah uraian tentang moral lingkungan hidup tersebut di atas, kini saatnya untuk membahas sifat etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup dapat diartikan sebagai “filsafat tentang ajaran moral mengenai lingkungan hidup”. Boleh juga dikatakan sebagai refleksi sistematis tentang apa yang disebut sebagai moral lingkungan hidup.

Ciri-ciri etika lingkungan hidup adalah adanya *sikap dasar dan tanggung jawab*.

Pertama, sikap dasar yang dituntut adalah *menguasai secara berpartisipasi dan menggunakan sambil memelihara*. Menguasai secara

berpartisipasi berarti manusia tetap menguasai (baca: mengolah) alam dan menggunakan lingkungan hidup itu. Yang perlu berubah secara fundamental adalah cara penguasaan dan pemanfaatannya (Aptik, 1989 :51, Magnis-Suseno, 1991: 232). Sikap dasar yang dituntut tersebut sebenarnya sudah dicantumkan dalam GBHN 1999-2004. Di sana disebutkan bahwa pengelolaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilakukan secara rasional dan bijaksana. Rasionalitas dan kebijaksanaan merupakan dua prinsip etis dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Diasumsikan bahwa jika kedua prinsip etis tersebut dilaksanakan secara konsekuen, maka tidak akan muncul perilaku egosentrik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebaliknya yang muncul adalah *homo* dan *ekosentrik* dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam.

Dengan demikian, maka etika lingkungan hidup Indonesia berorientasi pada pemanfaatan, prinsip perlindungan lingkungan, utilitarianisme, pengawetan atau konservasi, keberpihakan kepada yang lemah, menghindari kerugian dan menciptakan keadilan (Bdk. W. Chang, hal. 72-75). Ini semua dapat disebut etika lingkungan hidup Indonesia, bila memang orientasi pengelolaan lingkungan hidup itu berpegang pada sikap dasar tadi, yaitu *homo* dan *ekosentrisme* yang selaras, serasi dan seimbang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua, adalah soal tanggung jawab. Dalam etika, tanggung jawab merupakan sebuah prinsip moral yang selalu menjadi objek kajian. Berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, maka tanggung jawab yang dimaksud ialah bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak hanya untuk generasi

sekarang, melainkan juga untuk kepentingan generasi yang akan datang. Selain itu, tanggung jawab juga berarti kesediaan untuk menjalankan semua kewajiban yang telah ditentukan dalam norma-norma lingkungan hidup. Perilaku yang bertanggung jawab ialah perilaku yang tidak mengabaikan kewajiban moral yang telah ditentukan “hati nurani dan norma-norma”.

a. Etika Deskriptif

Berdasarkan pada pengertian etika deskriptif yang dikemukakan sebelumnya (K. Bertens, 2001 : 15), muncul pertanyaan apakah etika lingkungan hidup Indonesia adalah etika deskriptif (etika yang lebih melukiskan)? Etika deskriptif adalah sebuah etika yang penting. Walaupun etika ini tidak memberikan penilaian tentang baik-buruk, benar dan salahnya suatu tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, namun dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup terdapat pula unsur-unsur etika ini. Sebagaimana dikemukakan, bahwa sikap dasar (*homo dan ekosentrik*) yang terdapat dalam GBHN, orientasi dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dan tanggung jawab adalah gambaran atau deskripsi adanya etika ini. Pelukisan atau gambaran etika itu memang belum berkaitan dengan penilaian, sebab penilaian baru dilakukan setelah adanya perwujudan atau pelaksanaan dari sikap dasar dan tanggung jawab di atas. Dengan kata lain, orang dapat melukiskan tentang alasan-alasan etis, latar-belakang atau sebab-sebab mengapa Indonesia memiliki sikap dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, tanpa memberikan penilaian apakah sikap dasar dan tanggung jawab itu benar atau salah.

Bagaimana pun dilihat dari aspek tujuan penilaian moralitas tindakan atau perilaku manusia Indonesia terhadap lingkungan hidup, etika deskriptif tidak dapat diterapkan. Tidak mungkin kebijakan pengelolaan hutan yang keliru, penghacuran terumbu karang, impor limbah berbahaya dan beracun (B3), pengotoran udara, pencemaran sungai dan sebagainya dibiarkan saja tanpa adanya penilaian dari segi moral tentang baik dan buruknya tindakan-tindakan itu.

b. Etika Normatif

Dapatlah dikatakan bahwa etika normatif adalah sifat dari etika lingkungan hidup (berdasarkan pengertian dari K. Bertens, 2001 :17). Tidak seperti etika deskriptif, etika normatif ini adalah etika yang memberikan penilaian moral, bahkan bersifat memerintahkan (*preskriptif*), misalnya “lestarikan fungsi lingkungan hidup dan jangan mencemari lingkungan, sebab lingkungan hidup vital bagi kelangsungan hidup manusia”.

Etika normatif ini mengandaikan tersedianya norma-norma lingkungan hidup. Sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu bahwa norma-norma itu menjadi “tolak ukur” apakah suatu perbuatan dikatakan benar atau salah, atau apakah suatu perilaku tertentu dalam bidang lingkungan hidup baik ataukah buruk. Maka etika normatif ini memberikan penilaian apakah suatu tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu merupakan tindakan benar, baik ataukah tidak dan karenanya perlu ditolak.

Dilihat dari aspek tujuan umum pengelolaan lingkungan, yaitu terawatnya lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan kehidupan manusia, maka etika ini dapat dipakai sebagai “pedoman analisa perilaku”.

Disamping itu mengingat degradasi lingkungan hidup dewasa ini tampaknya semakin menjadi-jadi, kurang adanya penghargaan terhadap nilai-nilai lingkungan hidup (H. Rhiti, *Sura Pembaruan*, 27/9-2001), maka etika normatif yang khusus atau terapan (*applied ethics*) dapat menjadi etika lingkungan hidup Indonesia. Namun karena etika ini “sama” dengan etika (klasik) kewajiban menurut I. Kant, maka penerapannya mesti diikuti dengan kesadaran bahwa bukan hanya karena kewajiban moral manusia Indonesia sangat dibutuhkan dalam menyelamatkan lingkungan hidup, dan karenanya orang mesti melaksanakan seluruh kewajibannya, melainkan juga terutama kesadaran bahwa lingkungan hidup sangat vital, penyangga kehidupan manusia (*life supporting system*), yang kelestarian fungsinya tergantung pada baik-buruknya perilaku manusia sendiri. Dengan demikian sebenarnya dapat juga dikatakan bahwa *penerapan etika normatif yang khusus ini mesti bersumber juga dari keutamaan (arete) manusia Indonesia (Etika Keutamaan Aristoteles)* yang memiliki keunggulan perilaku, keluhuran watak dan kualitas budi pekerti, sehingga perilakunya terhadap lingkungan hidup senantiasa merupakan perilaku yang baik. Jadi berubah-ubahnya norma lingkungan, perubahan pendekatan manusia terhadap lingkungan hidupnya, kekeliruan norma atau bahkan tidak tersedianya norma-norma lingkungan sekalipun, keutamaan manusia Indonesia tetap tidak berubah, karena mereka “senantiasa mengenal tentang apa yang baik dan bahagia bagi tujuan hidupnya” (Aristoteles, 1978 : 20). Ditegaskan lagi, bahwa dari sudut pandang etika, maka keutamaan harus menjadi sumber otentik pelaksanaan kewajiban moral normatif yang bersifat khusus itu. Tanpa keutamaan, sebaik atau sebagus

apapun norma-norma moral lingkungan, dari mana pun himbauan atau perintah melaksanakan kewajiban lingkungan, tetap menimbulkan kesulitan pada bagaimana menata (*compliance*) moralitas manusia Indonesia

c. Etika Keutamaan dan Etika Kewajiban

Sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu, bahwa secara klasik ada dua macam etika, yaitu *etika keutamaan* dan *etika kewajiban*. Sebenarnya “keutamaan” dan “kewajiban” di sini lebih menunjuk pada sifat etika dari pada jenis etika. Maksudnya, manakah sifat yang lebih baik secara moral, keutamaan ataukah kewajiban, ataukah kedua-duanya? Dari sini bisa timbul perdebatan panjang-lebar tentang garis batas antara keutamaan dan kewajiban. Bila orang melakukan semacam refleksi, maka bisa saja orang sampai pada pendapat bahwa “dari segi moral, keutamaan dan kewajiban saling mengambil bagian satu sama lain”. Misalnya apabila orang melaksanakan semua kewajibannya di bidang lingkungan hidup (kewajiban sebagaimana ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan), maka orang tersebut memiliki keutamaan, keluhuran watak dan kualitas budi pekerti yang baik. Tetapi bisa sebaliknya dikatakan bahwa justru orang tersebut melakukannya hanya karena *sesuai* kewajibannya (yang ditetapkan dalam norma moral lingkungan), punya motivasi atau menggantungkan kebaikan perilakunya pada syarat-syarat tertentu, bukan karena memiliki keutamaan. Dengan demikian, yang terakhir ini “tetap tidak bermoral” menurut etika kewajiban Immanuel Kant. Misalnya saja orang tidak mencemari sungai atau merusak /membakar hutan yang jauh dari pengawasan (sebenarnya bisa saja dilakukannya) hanya karena sesuai kewajiban moralnya untuk menjaga, melestarikan fungsi

lingkungan hidup, atau karena sesuai dengan larangan yang terdapat dalam undang-undang. Apakah orang ini mempunyai keutamaan?

Menurut Etika Keutamaan Aristoteles, orang itu memiliki keutamaan, sejauh dia sadar, kenal dan memiliki akal-budi yang pada akhirnya membuat dia menjadi bahagia (*eudaimonia*), bahwa sungai dan hutan itu adalah komponen lingkungan hidup yang secara alamiah dan kodrati menjadi "*lebenswelt*"-nya manusia. Sebaliknya dia tidak mempunyai keutamaan, apabila dia tidak sadar, tidak kenal tentang arti pentingnya sungai dan hutan itu dan dia tidak berbuat apa pun terhadap komponen lingkungan hidup itu. Atau kalau dia tidak mencemari sungai dan membakar hutan tersebut hanya karena takut dipenjara. Di satu pihak dia tidak menyalahi aturan moral, namun di pihak lain secara filosofis (dari sudut pandang etika) tindakannya itu tidak memiliki dimensi etis.

Demikian pula menurut Immanuel Kant. Tindakan orang itu tadi, tidak mempunyai nilai moral karena perbuatan itu dilakukannya *sesuai* dengan kewajibannya saja, yang pada dasarnya bersifat egois, melawan prinsip *imperatif kategoris*, sebab tindakan itu bisa saja dilakukan karena ketakutan, atau ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan pemerintah. Sebaliknya disebut "bermoral" menurut I. Kant, apabila tindakan orang tersebut dilakukan *demi* kewajibannya semata-mata tanpa dikaitkan dengan motivasi atau syarat-syarat tertentu. Kesulitan yang bisa timbul sehubungan dengan etika ini bagi Indonesia ialah sulitnya membedakan antara *demi* kewajiban dan *sesuai* kewajiban (H. Rhiti, Suara Pembaruan, 20/5-1997).

1. Meskipun demi kewajiban lebih bermoral menurut I.Kant, namun apabila orang melaksanakan *sesuai* kewajibannya di bidang lingkungan hidup, tidak dapat dikatakan sebagai “tidak bermoral”.
2. Melaksanakan, pelestarian, perawatan, pengawetan, konservasi, atau usaha-usaha untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup adalah kewajiban moral manusia Indonesia. Apabila kondisi riil-substansial ekologis atau “keberadaan ontologis” lingkungan hidup sesuai yang diharapkan seluruh manusia Indonesia (seperti juga yang terdapat dalam norma-norma lingkungan hidup), maka dapat dikatakan bahwa “perilaku Indonesia terhadap bidang lingkungan hidup telah *sesuai* dengan kewajibannya di bidang itu”.
3. Tanpa membedakan antara *demi* dan *sesuai* kewajiban, aspek moralitas dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah semacam moralitas kewajiban (*morality of duty*), artinya yang terpenting adalah pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebagai suatu kesepakatan bersama. Dalam hal ini bila tujuan itu tercapai, tidak perlu dipersoalkan lagi apakah itu melalui suatu proses perilaku *demi* atau *sesuai* dengan kewajiban. Namun pada tataran pembahasan tentang kualitas atau keunggulan pribadi (ke-diri-an) manusia Indonesia di bidang lingkungan hidup bisa saja moralitas kewajiban itu diupayakan menjadi *moralitas aspirasi* (*morality of aspiration*) (Lon L. Fuller, 1963: 17-18) yang isinya antara lain adalah etika keutamaan versi Aristoteles.

4. Kesulitan lain yang timbul berkenaan dengan perbedaan antara *demi* dan sesuai kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup ialah bahwa secara formal pemerintah Indonesia menciptakan mekanisme hadiah atau penghargaan bagi mereka yang berjasa atau berhasil dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Ini merupakan insentif atau rangsangan bagi setiap orang untuk berlomba melestarikan fungsi lingkungan hidup. Secara politis, tampaknya pemerintah melihat di satu sisi kualitas lingkungan telah turun (degradasi ekologis) dan disisi lain perlu menciptakan mekanisme atau semacam "strategi" merubah perilaku. Bila orang kemudian berlomba-lomba berprestasi agar dapat meraih hadiah, penghargaan atau insentif itu, maka tujuan pada lingkungan hidup *an sich* dapat tercapai. Tetapi dari aspek moral timbul masalah. Perbuatan atau perilaku baik itu (walaupun diiming-imingi dengan hadiah atau penghargaan) tampil secara fisik sebagai perbuatan baik dan sulit dikatakan sebagai tidak bermoral. Namun karena moralitas itu juga menyangkut motivasi "dari dalam" maka perbuatan *demi* atau *supaya* mendapatkan hadiah itu kurang memiliki nilai moral atau tidak memiliki moralitas intrinsik. Sebaliknya perbuatan itu bisa dikatakan sebagai bermoral juga karena secara fisik baik, legal dan *sesuai* dengan ketetapan pemerintah (norma birokratis).

Selanjutnya apabila kedua etika tersebut diatas (etika keutamaan dan etika kewajiban) dibandingkan, terutama apakah etika dalam pengelolaan

lingkungan hidup Indonesia, maka secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Etika keutamaan lebih menekankan mutu pribadi manusia. Secara filosofis, keutamaan ini berkaitan dengan tujuan hidup manusia yaitu kebaikan dan kebahagiaan. Artinya manusia mesti mengenal dengan akal budi (*rasio*) nya tentang hal-hal yang baik dan bermanfaat dan *determinisme hukum alam*. Dengan demikian manusia sendiri dapat menentukan sendiri perilakunya, ia tahu mana yang baik dan mana yang buruk tanpa perlu adanya “pendiktean normatif” dari luar, atau tanpa tersedianya norma-norma pengatur perilaku. Dari segi penetapan etika bagi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, etika ini sangat ideal atau bersifat idealis. Tetapi justru inilah yang terbaik bagi tujuan pengelolaan lingkungan hidup, sebab manusia Indonesia tidak hanya melaksanakan kewajiban moralnya, melainkan ia tahu mengapa (alasan-alasan) ia harus bermoral. Hanya saja etika ini juga bukan tanpa kelemahan. Kelemahannya ialah sulit dan abstraknya mengetahui keutamaan dasar beserta ukuran-ukurannya. Sebab dalam prakteknya keutamaan ini bukanlah sesuatu yang *diam*, melainkan semacam sistem perilaku yang *bergerak*. Artinya, ia justru baru dapat diketahui apabila ada perilaku konkret, riil, dan itu bisa saja sekedar keharusan terpaksa melaksanakan kewajiban, dari pada sebuah keutamaan. Kelemahan lainnya ialah ketidakpastian keutamaan manusia karena berbagai

faktor seperti adanya perubahan jaman, pandangan atau pendekatan manusia terhadap lingkungan hidup. Maka tanpa adanya norma-norma pembantu perilaku, agak sulit mengharapkan keutamaan murni manusia itu. Sebaliknya, etika kewajiban tidak memfokuskan perhatian pada mutu manusia, atau karakter macam apakah manusia itu, melainkan pada benar dan salahnya perilaku manusia. Dengan kata lain perilaku konkrit menentukan mutu (baca: keutamaan) manusia. Tidak seperti etika keutamaan yang memulainya dari idealitas manusia, etika kewajiban bertolak dari kenyataan praktis, empirik perilaku manusia sendiri. Dan ini berarti tersedianya, atau ditetapkannya prinsip-prinsip atau norma moral (mis: bidang lingkungan hidup) menjadi faktor penting dalam etika ini. Norma-norma moral ini membantu manusia mengenal mana yang benar dan salah, atau mana yang baik atau buruk. Immanuel Kant mengatakan bahwa rasionalitas dari etika kewajiban ini terletak pada *praktische vermunft* (rasio praktis). Sebagaimana hukum, moral atau pengenalan akan hal-hal yang berguna bagi perilaku konkrit manusia berada pada rasio praktis manusia. Namun rasio praktis ini rupanya juga tergantung dari penetapan sesuatu yang berada di luar diri manusia (L. Tjahjadi, 1991: 38, 45-64). Dalam bidang lingkungan hidup etika kewajiban dewasa ini merupakan sebuah sarana yang dibutuhkan agar sedapat dan sepraktis mungkin setiap perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup adalah perilaku yang bermoral. Artinya, menurut

Immanuel Kant, yang terpenting adalah pelaksanaan semua kewajiban yang telah ditetapkan. Moralitas manusia di bidang lingkungan hidup akan tercapai apabila orang menaati norma-norma itu bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan, atau lantaran takut pada mereka yang menetapkan kewajiban-kewajiban itu, melainkan karena norma-norma itu merupakan kewajiban manusia (bdk. L. Tjahjadi, 1991 : 47). Dengan demikian, maka etika kewajiban ini bersifat normatif dan terapan praktis pada bidang-bidang yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Etika ini juga punya kelemahan, yaitu ketergantungan mutlak manusia pada prinsip-prinsip atau norma-norma moral. Tanpa norma-norma itu bisa saja tidak ada lagi kewajiban yang harus dijalani atau dilaksanakan. Selain itu, tidak diperhitungkan juga kemungkinan adanya kekeliruan pada hukum, atau norma-norma moral yang ada. Sebab, moralitas yang baik tidak mungkin membenarkan dan melaksanakan begitu saja sesuatu yang keliru atas nama demi kewajiban semata-mata. Maka pelaksanaan kewajiban mengandaikan pula "keutamaan" mengetahui mana yang keliru dan mana yang tidak.

2. Dapat dikatakan bahwa etika keutamaan bukan etika deskriptif atau bersifat deskriptif. Etika keutamaan berkaitan juga dengan penilaian baik-buruknya perilaku manusia, terutama di bidang lingkungan hidup. Sementara itu etika deskriptif tidak berusaha memberikan penilaian tentang baik-buruknya suatu perilaku, atau

diterima dan tidaknya suatu perbuatan. Sebaliknya etika kewajiban pun bukan etika deskriptif. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa etika kewajiban adalah etika yang bersifat normatif atau etika normatif. Berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, maka etika kewajiban ini adalah *etika normatif yang bersifat khusus* yang diterapkan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.

3. Etika keutamaan memiliki nilai filosofis yang dalam karena ia mengandaikan adanya refleksi sistematis manusia tentang kekodratan-nya, tujuan hidup dan kebahagiaan “spiritual” yang harus dicapai. Manusia mesti merenungkan tentang dirinya sendiri, eksistensi dan transendensi dirinya serta kesatuannya dengan alam semesta. Karena itu etika ini menjadi tidak praktis bagi pedoman perilaku di bidang lingkungan hidup. Sebaliknya etika kewajiban yang normatif-khusus itu karena “kepraktisan”nya tidak mengandaikan adanya refleksi terlebih dahulu tentang siapakah manusia itu. Yang penting ialah tersedianya prinsip-prinsip atau norma-norma moral dan orang mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya.

BAB VI

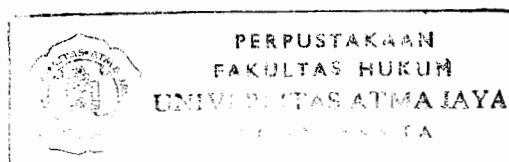
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tentang apakah sifat etika lingkungan hidup Indonesia dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika lingkungan hidup Indonesia adalah etika kewajiban yang bersifat normatif dan khusus. Namun sebagaimana dikemukakan pada uraian-uraian di bagian pembahasan, etika kewajiban normatif khusus ini ditunjang dengan etika keutamaan. Artinya pelaksanaan kewajiban-kewajiban moral di bidang lingkungan hidup itu bukan karena prinsip-prinsip moral semata-mata, melainkan juga karena keutamaan atau mutu pribadi manusia Indonesia. Norma lingkungan hidup Indonesia mendeskripsikan adanya sikap dasar dan tanggung jawab manusia Indonesia terhadap lingkungan hidupnya. Kewajiban moral menuntut pelaksanaan sikap dasar dan tanggung jawab itu.

B. Saran

1. Perlu adanya studi yang lebih komprehensif tentang etika lingkungan hidup terutama di Perguruan-perguruan Tinggi.
2. Orang mesti lebih mengutamakan pengertian dan pemahaman-pemahaman mengenai aspek pribadi dan perilaku dirinya sendiri, dan nilai-nilai substansial ekologis lingkungan hidup dari pada melaksanakan secara buta semua kewajibannya tanpa mengetahui hakekat perilakunya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. 1978. *Nichomachean Ethics*. Translated with Introduction and Notes by Martin Ostwald, Indianapolis: Bobbs-Merill Educational Publishing.
- Baumann, Juergen, 1989. *Einfuehrung in die Rechtswissenschaft*, Muenchen: C.H. Beck Verlag.
- Baker, Anton, 1984. *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , -----, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius.
- , -----, 1995. *Kosmologi dan Ekologi*, Yogyakarta, Kanisius.
- Bertens, K., 2000. *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Chang, William, *Moral Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Kanisius.
- Darmodiharjo, Darji, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- De Vos, H. 1987. *Pengantar Etika*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Dussel, E. "Analysis of the Final Document of Puebla: The Relationship between Economics and Cristian Life". *Concilium*.
- Fagothey, A. 1953. *Right and Reason*, St. Louis: CH. Mosby Company.
- Fuller, Lon, L., 1963. *The Morality of Law*, New York, Fawcett Publications, Inc.,
- Glaeser, B. 1989: *Kebijakan Lingkungan Hidup, Contoh Republik Federasi Jerman Dalam Konteks Internasional*, Jakarta: Frederich Eber-Stiftung.
- Hadiwardoyo, Purwa, 1990. *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Hammersma, Harry, 1985. *Filsafat Eksistensi Karl Jaspers*, Jakarta, Gramedia.
- Held, Virginia, 1989. *Etika Moral. Pembenaran Tindakan Sosial*, Jakarta, Erlangga

- Henriques. Embu, dan Alex Seran, 1992. *Iman dan Ilmu*. Refleksi Iman Atas Masalah-Masalah Aktual, Yogyakarta, Kanisius.
- Huijbers, Theo, 1986. *Manusia Merenungkan Dunianya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Kattsoff, Louis, O., 1989. *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Keraf, Sonny, A., 1999. Wawancara dalam majalah *Ozon*, ed. Desember.
- Kloepfer. Mikhail, 1989. *Umweltrecht*. Muenchen, CH. Beck Verlag.
- Leroy, Pierre, 1966. "Teilhard de Chardin: The Man", *Le Milieu Divin*, London, William Cillins & Co. Ltd.
- Magnis-Suseno, 1991. *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta, Gramedia.
- , 1997. *13 (tigabelas) Tokoh Etika*. Sejak Jaman Yunani Sampai Abad Ke-19, Yogyakarta, Kanisius.
- Mertokusumo. Sudikno, 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Rehнке. J., 1959. *Geschichte der Philosophie*. Wiesbaden, VMA-Verlag.
- Rhiti, Hyronimus, 1996. *Etika Lingkungan Hidup*. Tulisan dalam rangka Ulang Tahun Prof. Koesnadi H., ke-70, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- , "Manfaat Etika Dalam Ketahanan Ekologi", *Suara Pembaruan*, 20/5/1997.
- , "Gerakan Moral Hari Bumi", *Suara Pembaruan*, 22/4/2000.
- , "Lingkungan Hidup Bernilai", *Suara Pembaruan*, 27/9/2001.
- Sudarminta, J., 1991. "Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban?", *Basis*, Mei XL-No.5.
- Sutrisno, Muji, 1997. *Sari-Sari Pencerahan*, Yogyakarta, Kanisius.

Tjahjadi, Lili, 1991. *Hukum Moral. Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta, Kanisius.

Vallentiner, T., 1965. *Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Stuttgart, Reclam.

van der Weij, PA., 1988. *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*. Jakarta, Gramedia.

Williams, Bernard, 1985. *Ethics and the Limits of Philosophy*, Harvard University Press.

